



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penting bagi setiap daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan salah satu sumber terpenting pendapatan asli daerah yang dominan setelah retribusi adalah pajak. Hal ini juga tertuang dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang secara jelas mengatakan bahwa pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pemerintahan sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkatkan sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan, terdiri dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Yuswar Zainul 2005:90). Pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud dari desentralisasi fiskal, untuk memberikan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya (Adrian Sutedi, 2008:14).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut juga sebagai PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (undang-undang otonomi daerah Tahun 2004).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada di kabupaten Kampar itu sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi . Beberapa jenis pajak yang ada dikabupaten kampar yaitu :

A. Pajak Provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

B. Pajak Daerah terdiri atas :

1. Pajak Hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak air tanah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

8. Pajak bea perolehan hak atas tanah
9. Pajak parkir
10. Pajak sarang burung walet
11. Pajak bumi dan bangunan

Dengan demikian, pendapat asli daerah merupakan salah satu sumber yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah dibidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintahan daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.2 Pengertian Pajak

Dalam Gusfahmi (2007:27) secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah Dharibah yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, dan membebaskan.

Menurut Yusuf Qardhawi pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh Negara (Gusfahmi, 2007:31)

Menurut pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, (Mba. Mardiasmo, 2008 :1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Fidel (2010:4), pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang, atas penghasilan nya tersebut, maka sebagainya wajib diberikan kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi.

Adapun menurut P.J.A Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Fidel, 2010:4)

Dalam Marihot p. Siahaan (2005:7) pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontrasiprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar dan pengeluaran umum dengan penjelasan sebagai berikut :

Dapat di paksakan artinya : bila hutang pajak tidak di bayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita dan juga penyanderaan, terhadap pembayaran, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti hal nya retribusi.

Berdasarkan undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan dan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapan beban kepada rakyat, seperti pajak dan retribusi daerah harus ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Menurut (Waluyo 2011:23) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut prof, Dr, MJH Smeets (Sudarsono 2000:1) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang menurut norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang diajukan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari disertasinya yang berjudul pajak berdasarkan azas gotong royong menyatakan pajak adalah iuran wajib yang berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Waluyo 2007:3)

Sedangkan menurut Mr. Dr. Nj. Feldmann dalam buku *de overheidsmiddelen van Indonesia* (terjemahan) pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (Menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Waluyo, 2007:2)

Dalam Erly (2008:4) pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Dalam Rochmat Soemitro, (2004:8) pajak merupakan peralihan kekayaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya secara langsung dapat berupa penggarongan , perampasan, pencopetan (dengan paksa), atau pemberian hadiah dengan sukarela dan ikhlas (tanpa paksaan).

2.3 Pajak menurut Pandangan Islam

Pajak dalam pandangan islam sebagai mana dalam firman allah dalam surat At-Taubah ayat 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*

Pajak dalam islam disebut dengan jizyah yaitu perkepala yang di pungut oleh perkepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Jizyah pungutan dapat dipaksakan dimana dalam ayat di atas oleh diperangi bagi yang tidak mau membayar jizrah. Sebagaimana pajak dapat dipaksakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika pajak dipungut menurut secara islam bagi yang enggan membayar pajak dapat ditagih secara paksa, sita dan bahkan boleh diperangi sehingga wajib pajak tersebut tunduk terhadap aturan yang telah di keluarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan definisi pajak, maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan kekuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah berdasarkan jenis pajak yang dipungut.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak).
4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari Negara kepada pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak.
6. Pajak memiliki sifat yang dapat dipaksakan. Artinya wajib membayar pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4 Pajak Daerah

Dalam Marhot p. Siahaan (2005:10) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Adrian Sutedi, 2008:6).

Pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu :

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat.

Dengan demikian, fungsi finansialnya yaitu pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah (apa lagi untuk saat ini , pajak sumber dana bagi pemerintah yang paling utama, dikarenakan mulai berkurang nya sumber dana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya yang dimiliki pemerintah, misalnya : minyak dan gas bumi) guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan Negara.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara fiskus dan wajib pajak (Fidel, 2010:6).

Jika dilihat dari konsep pajak, maka pajak biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Sementara itu, dapat dilihat pada pasal 2 ayat 4 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa dengan peraturan daerah dapat diterapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan dalam memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak atau terdapat atau terdapat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Objek pajak bukan merupakan objek provinsi dan atau objek pajak pusat
- e. Potensinya memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

2.5 Tolak Ukur Menilai Pajak Daerah

Dalam penerimaan pajak daerah agar sesuai dengan makna pelaksanaan otonomi daerah, pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan kepada sektor pajak mutlak untuk dilakukan, karena tolak ukur ini cukup berguna sebagai alat ukur untuk menilai baik dan tidaknya pajak daerah yang ada dan pajak daerah yang diusulkan. Menurut Tjip (Haula Rosdina, 2012: 65) ada 5 tolak ukur untuk menilai pajak daerah yaitu sebagai berikut :

1. Hasil : Menandai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang di biayanya, yakni stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi penduduk dan sebagainya. Juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
2. Keadilan : Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang ada, pajak haruslah adil secara horizontal dan vertikal. Pajak haruslah adil dari tempat ke tempat, dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari suatu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Daya guna ekonomi : Pajak hendaknya mendorong atau setidaknya-tidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencengah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau menabung, dan memperkecil “Beban Lebih” pajak.
4. Kemampuan melaksanakan : suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemampuan politik dan kemampuan tata usaha.
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah : Haruslah jelas kepada daerah maka suatu pajak harus dibayarkan dan tempat akhir pajak. Pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah kedaerah lain. Dari segi potensi ekonominya, pemungutan pajak daerah juga hendaknya tidak mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah.

Selanjutnya berhubungan dengan tolak ukur untuk menilai pajak daerah atas Musgrave (Waluyo, 2007:13) kemudian mengemukakan suatu sistem pajak yang baik haruslah memenuhi kriteria antara lain :

1. Benefit principle dalam sistem perjakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat dan dinikmatinya dari pemerintah.
2. Ability princilple, dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar. With holding sistem, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya yang terutang oleh wajib pajak.

2.6. Pajak Hotel No.7 Tahun 2011

Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. (peraturan daerah kabupaten Kampar no. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel).

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran (Marhot p.Siahaan 2005:246).

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel (Marhot p.Siahaan 2005:246). Pengertian pajak hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada.

Adapun di kabupaten Kampar membentuk peraturan daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengeluarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang pajak hotel.

2.7 Objek dan Subjek Pajak Hotel

Menurut peraturan daerah No.7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Bab II pasal 3 ayat 1, objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana dibawah ini:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata, wisma pariwisata, losmen, dan rumah penginapan.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel.

Sedangkan bukan objek pajak hotel yang dimaksud pada ayat (1) menurut peraturan daerah Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Bab II pasal 3 ayat 3 adalah:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintahan atau peraturan daerah
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
3. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
4. Jasa tempat tinggal rumah sakit, asrama perawatan, panti jompo, panti asuhan dan panti social lainnya yang sejenisnya, dan
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sedangkan objek pajak hotel menurut peraturan daerah No.7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Bab II pasal 4, bahwa subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek pajak hotel yaitu konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Dan yang menjadi wajib pajak hotel yaitu pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Jadi subjek pajak hotel dan wajib pajak itu tidak sama.

2.8 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Siahaan (2010) dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel.

2. Tarif Pajak Hotel

Zuraida (2012) tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten atau kota diberi kewenangan untuk menempatkan besarnya tarif pajak yang mungkin

berbeda dengan kabupaten atau kota lainnya, asalkan tidak melebihi dari 10% (sepuluh persen).

3. Perhitungan Pajak Hotel Terutang

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah sesuai dengan rumus berikut.

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang} \\ &\quad \text{Seharusnya Dibayar Kepada Hotel}\end{aligned}$$

2.9 Sistem Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Kampar

Menurut Johnson, ketzs dan Rosenzweig (dalam Harsono, 2011:3) Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah (Afrizal, 2009:47). Adapun system penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kampar adalah :

1. Pendaftaran dan pendataan

Untuk mendapatkan dana wajib pajak dilaksanakan pendaftaran pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran da pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak, dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

2. Perhitungan dan penetapan

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan system self assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3. Pembukuan dan pelaporan

Wajib pajak hotel dengan peredaran usahanya, wajib menyelenggarakan pembukuan yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan, harga jual. Pembukuan adalah suatu proses penetapan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.

4. Pembayaran dan pemungutan/penagihan pajak hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kesiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain membentuk kolektor dengan menerbitkan SK kolektor dalam hal pemungutan tersebut.

Tetapi harus diingat bahwa untuk terkoordinasinya penerimaan pajak hotel sangat diperlukan suatu organisasi yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar karena diketahui aktivitas yang dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya organisasi dan organisasi merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Apabila dikaitkan dengan peranan di Dinas Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pajak daerah yang meliputi fungsi pemungutan, koordinasi, dan pembinaan teknis dalam penerimaan pajak dan redistribusi daerah bahwa rangkaian pengelolaan organisasi akan menjadi fungsi keberhasilan tujuan yang diinginkan.

Sehubungan dengan penerimaan pajak daerah, yang salah satu nya adalah pajak hotel yang telah ditetapkan paling tinggi 10% dan nilai atas pelayanan nya, atas wajib pajak yang terdapat di Kabupaten Kampar berdasarkan ketentuan peraturan daerah nomor 7 Tahun 2011, maka keberhasilan pencapaian target tidak terletak ditangan kepala Dinas Pendapatan tetapi melainkan rangkaian kerja dan seluruh unit kerja yang ada di dinas pendapatan dengan melaksanakan sistem kerja yang sudah disusun secara optimal.

2.10 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan pajak hotel terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Rahmanto (2007) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektifitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000 – 2004. Efektifitas yang meningkat akan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000– 2004 nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 10,9 % sisanyadipengaruhi oleh unsur pajak daerah yang lain.

Ardhiyansyah (2005) dalam penelitiannya mengkaji bahwa variabel JumlahHotel dan Restoran, Tingkat Inflasi dan Jumlah Wisatawan Nusantara akanmempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Dalam penelitian ini juga dikaji mengenai tingkat efektifitas dan tingkat efisiensi dari Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Purworejo.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo padatahun1989–2003 sangat baik yaitu rata-rata sebesar 102,04%.
2. Tingkat efesiensi pajak hotel dan restoran di Kabuapten Purworejo padatahun anggaran 1989 - 2003 yaitu naik turun antara 24,66 % sampai dengan 27,29 %
3. Variabel yang dianggap berpengaruh terhadap realisasi pajak hotel danrestoran dalam penelitian ini adalah Jumlah hotel dan restoran, Tingkat inflasi, serta Jumlah wisatawan nusantara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dari hasil analisis diketahui bahwa variabel jumlah hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran sedangkan variabel tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara tidak signifikan.

Nuryono (2005) dalam penelitiannya mengkaji tentang potensi pencapaian pajak restoran dan pajak hotel dimana dalam pencapaiannya diperlukan berbagai aspek yang saling mendukung pada proses perpajakannya.

Adapun hasil dari penelitian tersebut antara lain :

1. Potensi pencapaian pajak hotel nilainya meningkat dari tahun ketahun sedangkan untuk pajak restoran justru mengalami penurunan.
2. Terdapat beberapa permasalahan dalam proses perpajakan salahsatunya pada sisi wajib pajak itu sendiri.

2.11 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu social (Masri Singarimbun 2005:33) Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yang akan diteliti yaitu:

1. Pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan turun lapangan untuk mengumpulkan data mengenai jumlah nilai pelayanan pajak hotel untuk memenuhi tujuan yang akan dicapai.
2. Perhitungan dan penetapan pajak merupakan kegiatan dimana pengusaha hotel mendaftarkan usahanya wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembukuan dan pelaporan merupakan kegiatan dimana pencatan data-data tentang pajak hotel di Kabupaten Kampar
4. Pembayaran dan penagihan/pemungutan merupakan kegiatan penarikan iuran pajak hotel yang ada di Kabupaten Kampar. (Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar (2011).

2.12 Konsep Operasional

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini, disini dikemukakan beberapa konsep operasioanal sebagai berikut:

Tabel 2.1. Konsep Operasional Variabel

KONSEP	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	SKALA PENGUKURAN
PERDA Kabupaten Kampar tentang pajak hotel No. 7 Tahun 2011	Pendaftarand an pendataan	a. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pajak hotel di Kabupaten Kampar b. Wajib pajak hotel yang tidak mendaftarkan usahanya sudah ditindaklanjuti dengan baik c. Kegiatan pencatatan data wajib pajak hotel telah dilakukan dengan baik d. Upaya dinas pendapatan dalam pengumpulan dan penyusunan subjek dan objek pajak hotel Kabupaten Kampar e. Prosedur yang diterapkan pemerintah dalam pendaftaran dan pendataan.	Skala Likert
	Perhitungan dan perhitungan pajak	a. Penetapan wajib pajak hotel dilaksanan dengan melihat pendapatan pengusaha hotel sudah dilaksanakan dengan baik b. Dinas pendapatan kabupaten Kampar melaksanakan sosialisasi tentang ketetapan pajak hotel kepada wajib pajak dengan baik c. Ketetapan pajak hotel telah	Skala Likert

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>dibuat oleh dinas pendapatan daerah kabupaten Kampar</p> <p>d. Ketentuan pajak hotel yang dibayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan sudah terlaksana dengan baik</p> <p>e. Kesalahan ketetapan pajak hotel dapat merugikan wajib pajak.</p>	
Pembukaan dan pelaporan	<p>a. Dispenda kabupaten Kampar telah membuat pembukuan tentang wajib pajak hotel yang terutang dengan baik</p> <p>b. Pembukuan dan pelaporan yang dibuat berdasarkan keadaan yang terjadi di lapangan yang disusun dengan baik</p> <p>c. Wajib pajak hotel yang tidak menyelenggarakan pembukuandan pelaporan ditindak lanjuti dengan baik</p> <p>d. Pelaporan pembukuan telah dilaksanakan dengan baik</p> <p>e. Pelaporan wajib pajak dilakukan oleh wajib pajak hotel sudah berjalan dengan baik</p>	Skala Likert
Pembayaran dan penagihan/pemungutan	<p>a. Prosedur dalam pemungutan dapat diikuti oleh wajib pajak hotel dengan baik</p> <p>b. Hambatan yang dialami oleh petugas kolektor pada saat pemungutan pajak dapat diselesaikan dengan baik</p> <p>c. Pemungutan / penagihan yang dilakukan oleh Dispenda kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik</p> <p>d. Pemungutan pajak hotel dilakukan kolektor yang berwenang terhadap setiap wajib pajak sudah berjalan dengan baik</p> <p>e. Sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik</p>	Skala Likert

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.13 Skala Pengukuran

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Keuntungan skala likert adalah:

1. Mudah dibuat dan diterapkan
2. Terdapat kebebasan dalam memasukkan pertanyaan-pertanyaan, asalkan masih sesuai dengan konteks permasalahan.
3. Jawaban suatu item dapat berupa alternative, sehingga informasi mengenai item tersebut diperjelas.
4. Reliabilitas pengukuran bisa diperoleh dengan jumlah item tersebut diperjelas.

Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda terdapat 5 pilihan skala dengan format :

1. Sangat setuju
2. Setuju
3. Cukup setuju
4. Tidak setuju
5. Sangat tidak setuju

2.14 Hipotesis

Dari perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut“ ***Di Duga Penerimaan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Belum Optimal Disebabkan Oleh System dan Prosedur yang Belum Baik***”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.15 Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan hak-hak ekonomi dan intelektual penulis dan tidak memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

